

LAPORAN  
RISET

TERPERANGKAP JARING LABA-LABA:

# TANTANGAN GERAKAN MAHASISWA PASCA ORDE BARU

Tim Peneliti:

*LUTHFIAN HAEKAL | VIOLA NADA H. | NAYSILLA ROSE FAJRIYA T. | DIKA AYU W.*



AKADEMI  
AMARTYA

{ KURAWAL }  
FOUNDATION

**Hal paling agung  
dari anak muda  
adalah mereka  
berani menggugat  
penguasa, melawan  
ketidakadilan, dan  
berpikiran terbuka.**

*- Zack de la Rocha*

---

*Mungkin ada saatnya kita tidak berdaya untuk  
mencegah ketidakadilan, tetapi tidak boleh  
ada saat di mana kita gagal untuk memprotes.*

**(Elie Wiesel)**

---



---

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

#### KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/ atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

# **Terperangkap Jaring Laba-Laba: Tantangan Gerakan Mahasiswa Pasca Orde Baru**

LUTHFIAN HAEKAL  
VIOLA NADA H.  
NAYSILLA ROSE FAJRIYA T.  
DIKA AYU W.



# Tim Peneliti

## ***Luthfian Haekal***

---



Mahasiswa pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol, UGM. Tertarik di dalam isu gerakan sosial, lingkungan, perburuhan, dan teori post-struktural. Tengah mengerjakan tesis tentang artikulasi forgiveness (pemaafan) Derridean konteks tragedi Semanggi I dan II.

## ***Viola Nada Hafilda***

---



Mahasiswa semester akhir di Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM. Memiliki antusiasme dalam dunia jurnalistik serta pernah aktif menulis di pers mahasiswa dan beberapa media. Kadang bantu-bantu di Social Movement Institute. Kadang menghilang karena sibuk cari side job sebagai gen Z yang dijebak oleh fleksibilitas dunia kerja.



### ***Naysilla Rose Fajriya Taufiq***

---

*Mahasiswa semester tujuh di Departemen Sosiologi, FISIPOL UGM. Punya perhatian pada isu-isu Hak Asasi Manusia sejak masa SMA. Selain menyelesaikan sisa kredit semesternya, ia full-timer mengabdikan diri di Social Movement Institute. Kini, tengah menyelesaikan skripsinya tentang irisan isu perempuan, pemuda, dan agama.*



### ***Dika Ayu Wulandari***

---

*Mahasiswa akhir di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Punya hobi lari tapi bukan lari dari tanggung jawab. Mahasiswa biasa-biasa saja yang sedang berjuang untuk orangtua. Sedang senang-senangnya berdinamika di Social Movement Institute.*



**TERPERANGKAP JARING  
LABA-LABA: Tantangan  
Gerakan Mahasiswa Pasca  
Orde Baru**

**PENULIS**

Luthfian Haekal  
Viola Nada H.  
Naysilla Rose FT.  
Dika Ayu W.

**PEMERIKSA AKSARA**

Ahmad Mansyur Suryanegara

**DESAIN**

JOKO SUPRIYANTO

Diterbitkan oleh **AKADEMI AMARTYA**  
Oktober 2023  
16,5 x 24 cm, 28 hlm  
Yogyakarta, Akademi Amartya 2023

# **Beban Moral Gerakan Mahasiswa**

TIM RISET

**G**erakan Mahasiswa Pasca Orde Baru mengalami pukulan berat baik dari sisi internal dan eksternal. Riset ini mengambil sampel gerakan mahasiswa di Yogyakarta untuk menggambarkan tantangan tersebut. Dari sisi internal, gerakan mahasiswa mengalami fragmentasi isu, ego sektoral, regenerasi, dan minimnya partisipasi perempuan. Sementara, pada sisi eksternal, gerakan mahasiswa dihadapkan pada kebijakan kampus yang represif, program MBKM dari negara, dan intimidasi dari pihak luar.

Lebih-lebih beberapa riset seperti Aspinall (2012) dan Novianto (2016) menengarai gerakan mahasiswa masih belum lepas dari belenggu gerakan moral. Gerakan mahasiswa seakan-akan menjadi satu-satunya corong bersuara dan menyuarakan kegelisahan masyarakat. Berbagai mitos disematkan kepada gerakan mahasiswa seperti mahasiswa adalah agen perubahan, kompas moral, penyambung lidah, dan hal lainnya. Mitos tersebut malah membentuk gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang elitis dan terpisah dari gerakan rakyat.

Riset ini menemukan bahwa terdapat tiga pola terhadap pengamini gerakan moral. Pola pertama ia mengamini gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral. Pola kedua ia tidak mengamini gerakan moral, tetapi secara esensial argumen hampir sama dengan gerakan moral. Pola ketiga menolak gerakan moral.

Lantas, mengapa hal tersebut terjadi? Masih relevankah gerakan mahasiswa yang mengamini gerakan moral?

Salam  
Yogyakarta, 13 September 2023

Haekal, Cilla, Ola, Dika

# Daftar Isi

## ***Pengantar – 7***

## ***Daftar Isi – 9***

## ***Latar Belakang – 11***

Mengakui Dimensi “Moral” dalam Gerakan Mahasiswa – 12

Pertanyaan Riset – 17

Metode Penelitian – 17

Sebaran Data – 18

## ***Temuan – 19***

A. Tantangan Eksternal Gerakan Mahasiswa – 19

1) Pengalaman akan Kebijakan Kampus yang Mengekang – 19

2) MBKM, Magang, dan Kegiatan Lainnya – 20

3) Intimidasi – 21

B. Tantangan Internal Gerakan Mahasiswa – 23

1) Fragmentasi Isu – 23

2) Ego Sektoral dan Pecah Kongsi – 24

3) Regenerasi – 24

4) Minimnya Partisipasi Perempuan – 26

C. Posisi Terhadap Moralitas – 27

1) Menerima – 27

2) Menolak, tetapi secara esensial menerima – 29

3) Menolak – 31

## ***Penutup – 35***

## ***Daftar Pustaka – 37***

**Tidak akan ada  
kedamaian sejati  
tanpa keadilan, dan  
tanpa perlawanan  
tidak akan ada  
keadilan.**

***-Arundhati Roy***

---



# Latar Belakang

**A**rtikel ini membahas tentang tantangan eksternal dan internal gerakan mahasiswa pasca Orde Baru. Setelah runtuhnya Orde Baru, gerakan mahasiswa dihadapkan pada keabu-abuan musuh bersama. Tidak ada tokoh tunggal yang bisa ditembak untuk dikonstruksikan sebagai musuh bersama. Selain itu, gerakan mahasiswa hanya bergantung pada momentum. Mereka dapat bersatu dalam momen yang sangat temporal. Namun, pasca momen tersebut terlewat, gerakan mahasiswa mulai ber-serakan.

Riset mengenai gerakan mahasiswa telah banyak dilakukan (Aspinall, 2012; Husin, 2014; Sastramidjaja, 2019; Amin & Ritonga 2023). Dari berbagai riset tersebut, gerakan mahasiswa ditengarai sebagai gerakan berbasis moral (Aspinall, 2012), gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan (Husin, 2014), gerakan mahasiswa kehilangan "identitasnya" akibat demokratisasi (Sastramidjaja, 2019), dan gerakan mahasiswa menggunakan populisme sebagai basis gerakan (Amin & Ritonga, 2023). Sayangnya, riset-riset tersebut kurang menangkap tantangan gerakan mahasiswa hari ini di tengah gempuran negara, pasar, dan kampus. Oleh karenanya, tulisan ini akan menjabarkan bagaimana tantangan tersebut berdampak pada gerakan mahasiswa.

Kami mengambil lima universitas di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII) untuk menggambarkan tantangan tersebut. Kelima universitas tersebut aktif dalam pengorganisasian Geyajan Memanggil (GM) dari awal terbentuk sampai pasca perpecahan. Pada awalnya, GM berhasil untuk menyatukan berbagai partikularitas gerakan mahasiswa menjadi "satu"

karena ada momen “salahnya negara”. GM menjadi wadah bagi tiap-tiap gerakan mahasiswa untuk mengartikulasikan keresahannya. GM tidak hanya menjadi wadah bagi gerakan mahasiswa, tetapi juga membentuk aliansi lintas aktor seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karenanya, berbagai tuntutan mulai dari isu gender, buruh, HAM, dan isu lainnya muncul. Namun, pasca “momen” tersebut terlewat, GM mulai redup dan mengalami perpecahan. Selain GM kehilangan momentum untuk meng-“ada”, gerakan mahasiswa di dalamnya memiliki berbagai persoalan dari kampus yang semakin membatasi gerak mahasiswa.

Oleh karenanya, laporan ini akan membahas tentang pengalaman mereka dalam gerakan mahasiswa. Setidaknya, melalui pengalaman tersebut akan didapat data terkait tantangan eksternal dan internal gerakan mahasiswa. Lebih lanjut, artikel ini akan membahas terkait bagaimana dimensi “moral” yang terus menerus dikonstruksikan kepada gerakan masih berjalan dengan berbagai gempuran tantangan tersebut.

### ***Mengakui Dimensi “Moral” dalam Gerakan Mahasiswa***

Seperti yang telah dituliskan di atas, gerakan mahasiswa selalu erat dengan dimensi moralitas (Aspinall, 2012; Husin, 2014; Sastramidjaja, 2019; Amin & Ritonga 2023). Riset Aspinall (2012) dan Sastramidjaja (2019) menelisik dimensi moralitas tersebut dari angkatan 66. Sementara, Husin (2014) dengan bahasa yang berbeda, setidaknya menempatkan gerakan mahasiswa sebagai “mitra kritis” yang senada dengan aspek moralitas yang dikemukakan oleh Aspinall (2012) dan Sastramidjaja (2019). Begitu pula riset dari Amin & Ritonga (2023) yang menengarai gerakan mahasiswa sebagai “penjaga jalan lurus” ketika ada elite yang menyimpang. Sementara, riset yang mengkritik gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral telah dilakukan oleh Novianto (2016).

Aspinall (2012) menguraikan bahwa gerakan pemuda atau

mahasiswa di Indonesia cenderung dianggap sebagai gerakan moral atau bergerak berdasarkan *moral force*. Gagasan tersebut dimunculkan oleh kelompok mahasiswa yang terlibat dalam terbentuknya Orde Baru pada 1966. Hal tersebut dimanifestasikan lewat kritik terhadap Orde Baru karena korupsi dan penyelewengan lainnya. Pada tahun 70-an, gagasan tersebut tersebar di berbagai gerakan mahasiswa dan masih eksis sampai saat ini.

Aspinall (2012) menekankan pada empat kriteria gerakan moral, yaitu *pertama*, terlibat dalam politik sebagai “mahasiswa”, bukan terlibat dalam aliansi politik yang lebih luas dan tidak terkotak-kotakkan antar mereka. *Kedua*, mahasiswa menggunakan kompas moral sebagai motivasinya bergerak, bukan karena kepentingan dan ambisi pribadi. Hal tersebut didasari oleh status mahasiswa sebagai intelektual yang tugasnya adalah mencari pengetahuan dan kebenaran. *Ketiga*, mahasiswa bertindak untuk menyelamatkan bangsa dari orang-orang yang menyeleweng. Oleh karenanya, mereka berusaha mewakili orang-orang yang tidak bersuara. *Keempat*, mahasiswa tidak boleh tertarik dengan kekayaan, status, atau posisi yang memenangkan diri mereka sendiri. Peran mereka lebih kepada berbicara kebenaran yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Selanjutnya, riset Husin (2014) menekankan pada gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan. Melalui penggambaran Keluarga Mahasiswa UGM (KM UGM), Husin (2014) menjabarkan bagaimana KM UGM hidup dalam lintas zaman pemerintahan. Seolah mengamini Aspinall (2012), Husin (2014) menganggap gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan dengan basis “moral”. Husin (2014) menyebut gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan, karena gerakan mahasiswa berada di luar sistem politik formal. Gerakan mahasiswa memfokuskan tuntutan mereka kepada institusi formal untuk membenahi kebijakan. Terakhir, gerakan mahasiswa tidak menominasikan anggotanya untuk menduduki jabatan di sistem formal.

Husin (2014) juga memetakan saling silang antar ideologi gerakan mahasiswa berpengaruh terhadap sikap KM UGM kepada rezim yang ada. Misalnya, pada reformasi 1998, KM UGM mengandalkan massa

konfrontir. Tekanan politik dilakukan melalui paksaan, misalnya demonstrasi, okupasi, dan mobilisasi massa untuk mengubah kebijakan di tingkat universitas dan negara. Husin (2014) juga menekankan ketika massa reformasi, strategi yang digunakan KM UGM lebih konfrontir karena KM UGM diisi oleh KAMMI yang cenderung kontra dengan pemerintah. Oleh karenanya, sikap KM UGM ditentukan oleh pengisinya dan patron yang berhubungan dengan pengisinya.

Lebih lanjut, riset Sastramidjaja (2019) memaparkan bahwa gerakan mahasiswa umumnya kehilangan pengaruh politiknya begitu demokratisasi mulai berjalan. Kebebasan berekspresi dan berorganisasi mengurangi kebutuhan gerakan mahasiswa untuk berbicara dan bertindak atas nama "rakyat". Mengamini Aspinall (2012) gerakan mahasiswa adalah anak kandung otoritarianisme, sekaligus perusakannya. Gerakan ini tidak hanya muncul dan menjadi radikal sebagai respons terhadap otoritarianisme, tetapi sifat dan ruang lingkup aksinya adalah produk dari budaya politik otoriter yang merayakan perjuangan mahasiswa di masa lalu dan mendelegitimasi aktivisme mahasiswa di masa kini.

Bagi Sastramidjaja (2019), gagasan yang ditanamkan angkatan 66 masih eksis sampai hari ini. Angkatan 66 menekankan bahwa mahasiswa merupakan kategori politik penting dengan kapasitas untuk menyelamatkan bangsa di masa krisis. Prinsip kekuatan moral menjadi bagian penting dari identitas kolektif mahasiswa, memberikan kerangka legitimasi persuasif untuk protes mahasiswa dengan memosisikan mahasiswa sebagai "kritikus yang loyal" daripada penentang negara. Sastramidjaja (2019) juga menekankan gerakan mahasiswa terkungkung dalam bingkai "moral" perjuangan. Gerakan mahasiswa tahun 1970-an misalnya tetap menjadi anak Orde Baru - terkunci dalam pertarungan simbolis dengan negara dalam gelembung yang berpusat pada diri mereka sendiri. Oleh karenanya, tulis Sastramidjaja (2019), "Gagasan kekuatan moral juga mengimplikasikan separatisme mahasiswa: gagasan bahwa mahasiswa tidak boleh membangun aliansi dengan kelompok-kelompok sosial dan politik lain yang mungkin mencemari agenda mahasiswa dengan

kepentingan-kepentingan mereka". Gerakan mahasiswa hari ini cenderung "melanjutkan perjuangan" dari angkatan lalu dengan basis "moral".

Sementara itu, Amin dan Ritonga (2023) menggambarkan bagaimana Gerakan mahasiswa menggunakan populisme sebagai strategi gerakan. Melalui studi komparasi antara HMI dan Gema Pembebasan, Amin dan Ritonga (2023) menunjukkan bagaimana kedua organisasi tersebut menggunakan penanda "anti-elite" untuk menyuarakan tuntutan. Oleh karenanya, ada pembagian "baik" dan "buruk", "elite" dan "anti-elite", dan seterusnya. Amin dan Ritonga (2023) menemukan bahwa kedua gerakan mahasiswa tersebut menempatkan diri sebagai "orang biasa" yang melawan "elite" dan "elite" tersebut dikonstruksikan sebagai peminggir "umat".

Amin dan Ritonga (2023) cenderung mengamini populisme sebagai "idealisisasi" bagaimana dunia bekerja. Mengamini Gidron dan Bonikowski, Amin dan Ritonga (2023) mengerangkai populisme tidak hanya berkuat tentang kepemimpinan aktor, tetapi bagaimana ada ide bersama yang ingin diciptakan. Ide bersama tersebut telah terinsitituti dalam gerakan. Misalnya, Gema Pembebasan mengidealkan "khilafah" sebagai negara. Sementara, HMI mengkonstruksi adanya "elit" di pemerintahan yang buruk dan harus dilawan. Namun, "elite" tersebut dalam pandangan HMI tidak selamanya buruk. Amin dan Ritonga (2023) menemukan bahwa HMI mengkonstruksikan "elite" harus dilawan selama "elite" tersebut keluar dari "jalan lurus". Dari kedua gerakan mahasiswa tersebut, memposisikan gerakan mahasiswa sebagai "penjaga jalan lurus". Riset Amin dan Ritonga (2023) menguatkan tesis dari Aspinall (2012), Husin (2014), dan Sastramidjaja (2019), bahwa imajinasi berbasis "moral" masih menjadi titik utama gerakan mahasiswa.

Namun, seperti yang telah dijelaskan di atas, keempat riset tersebut belum nampak jelas menengarai tantangan mahasiswa hari ini. Keempat riset tersebut memang menunjukkan "watak moralitas" dari gerakan mahasiswa. Aspinall (2012) misalnya tidak menyinggung keterkaitan antara gerakan mahasiswa dengan eksperimentasi aliansi

pekerja akademik serta partikular gerakan lain. Riset Aspinall (2012) memang berhenti pada tahun 2000-an, oleh karenanya riset tersebut tidak menangkap bagaimana masifnya gerakan Reformasi Dikorupsi di berbagai daerah antara jejaring NGO, gerakan rakyat, dan gerakan mahasiswa.

Riset Husin (2014) dan Sastramidjaja (2019) belum menjelaskan bagaimana kondisi dan tantangan yang menghambat arah gerak mahasiswa. Misalnya, tentang dampak Covid-19 dan MBKM. Kondisi pasar tenaga kerja yang predatoris membuat mahasiswa menjadi asik dengan MBKM, karena MBKM menawarkan “hal jelas dan bisa dijual” untuk mencari kerja. Selain itu, kondisi kampus dengan berbagai aturannya juga turut “melemahkan” “moralitas” gerakan mahasiswa untuk melawan. Riset Amin dan Ritonga (2023) sayangnya tidak menempatkan pembentukan populisme sebagai hal yang cair. Dalam populisme, mengandaikan “umat” melawan “penindas”. Amin dan Ritonga (2023) telah menandai bagaimana “anti-elite yang menyimpang” dikonstruksikan oleh HMI dan Gema Pembebasan. Namun, dalam pembentukan “umat” relasi yang ada di dalamnya sangat cair. Maksudnya, “umat” membayangkan berbagai subjek disatukan dalam “satu bahasa penindasan”. Perbedaan antar subjek ditunda untuk bersatu dalam “umat tertindas”. Karena penundaan perbedaan tersebut, terdapat momen-momen untuk bercerai berai.

Novianto (2016) menengarai imajinasi tentang gerakan mahasiswa sebagai “juru selamat” menjadikan ia terlepas dari gerakan rakyat. Ia menyebut gerakan mahasiswa yang mengakui imajinasi tersebut sebagai gerakan yang pro dengan *status quo* dan bersifat regresif.

“*Pertama*, gerakan moral menolak membangun aliansi dengan gerakan rakyat atau politik massa. Hal tersebut dilakukan atas nama kemurnian gerakan dan agar terhindar dari kepentingan politik. *Kedua*, dalam gerakan moral berdalih tidak ada ambisi dan kepentingan pribadi ataupun kelompok terhadap kekuasaan. Mereka hanya memperjuangkan kebenaran yang mereka yakini dan tidak meminta sumbangsih dari perjuangannya tersebut. *Ketiga*, gerakan moral dalam melakukan gerakannya lebih berupa tuntutan koreksi dan peringatan. Mereka

menolak adanya radikalisme gerakan yang dianggap dapat mengancam stabilitas. *Keempat*, gerakan moral mengkonstruksi diri mereka sebagai resi, *agent of change*, tulang punggung negara, intelektual pembaharu, roda perubahan dan juga konstruksi *heroism* yang lainnya." (Novianto, 2016)

Beranjak dari "watak moralitas" sebagai hal yang terus menerus dikonstruksi, riset ini akan mendedah tantangan mahasiswa hari ini. Oleh karenanya, riset ini akan memberikan gambaran tentang apa-apa saja yang membatasi gerakan mahasiswa dalam melakukan gerakannya.

### ***Pertanyaan Riset***

Permasalahan riset dalam tulisan ini adalah jika memang "watak moralitas" menjadi hal yang terus menerus dikonstruksi bagi gerakan mahasiswa, maka bagaimana kondisi gerakan mahasiswa hari ini berpengaruh terhadap "watak moralitas" itu. Oleh karenanya, pertanyaan riset yang dijawab dalam riset ini adalah:

- a. Apa saja tantangan eksternal dan internal gerakan mahasiswa hari ini?
- b. Apakah "watak moralitas" masih diamini oleh gerakan mahasiswa? Dan mengapa hal tersebut terjadi?

### ***Metode Penelitian***

Riset ini merupakan riset kualitatif dengan mengambil subjek riset gerakan mahasiswa di Yogyakarta. Riset kualitatif dipilih karena ia mendokumentasikan pengalaman subjektif subjek riset dan oleh karenanya cenderung "*thick description*" (Marsh & Stoker, 2010). Pengalaman subjektif yang telah dialami oleh subjek riset kemudian ditafsirkan oleh penulis dan dimasukkan dalam kodifikasi tertentu untuk disusun.

Sementara, kami menggunakan wawancara sebagai metode pengambilan data dalam riset ini. Kami menggunakan *purposive sampling* dalam memilih siapa saja yang akan diwawancarai. Metode

pengambilan data ini mengasumsikan subjek yang dipilih dapat merepresentasikan pengalaman subjek secara “menyeluruh” (Robinson, 2013). Oleh karenanya, subjek dalam riset ini akan difokuskan ke aktivis mahasiswa yang aktif di gerakan mahasiswa sekaligus Gejayan Memanggil. Aktivis mahasiswa di Gejayan Memanggil dipilih karena mereka dianggap sebagai “*frontliner*” gerakan mahasiswa. Dengan berbagai dinamika dan kondisi yang ada, Gejayan Memanggil dianggap mampu menggambarkan berbagai tantangan gerakan mahasiswa hari ini.

### ***Sebaran Data***

Riset ini menelusuri aktivis mahasiswa dari lima universitas di Yogyakarta, yaitu; UGM, UNY, UIN, UMY, dan UII. Alasan pemilihan karena gerakan mahasiswa yang ikut dalam mengorganisir Gejayan Memanggil terkonsentrasi di lima universitas tersebut. Kami mewawancarai 9 aktivis mahasiswa yang terdiri dari lima laki-laki dan empat perempuan. Proporsi masing-masing dari UGM, UNY, UMY, dan UII sebanyak dua orang; satu laki-laki dan satu perempuan. Sementara, karena keterbatasan waktu, kami hanya mewawancarai satu orang dari UIN dengan identitas laki-laki. Kami berusaha untuk menghubungi aktivis perempuan di UIN, hanya saja sampai penulisan laporan ini, aktivis tersebut tidak memberikan respons. Meskipun secara kuantitas proporsi ini timpang, setidaknya dapat menangkap pengalaman yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam aktivisme.

# Temuan

## ***A. Tantangan Eksternal Gerakan Mahasiswa***

---

### **1) PENGALAMAN AKAN KEBIJAKAN KAMPUS YANG MENGEKANG**

Berdasarkan penuturan narasumber, terdapat berbagai aturan represif yang dikeluarkan oleh kampus untuk membatasi kegiatan dalam gerakan mahasiswa. Salah satu aktivis mahasiswa menuturkan bahwa mereka harus mendaftar dan mengisi data diri sebelum melakukan aksi. Narasumber lain juga menyampaikan bahwa kampus hanya memperbolehkan kegiatan dari organisasi kampus dengan “bendera” tertentu dengan argumen bahwa organisasi tersebut adalah *founding father* kampus tersebut. Pembatasan melalui aturan ini juga terwujud melalui pernyataan sikap kampus yang tidak mendukung aksi dengan tetap memberlakukan perkuliahan.

*“Kita dituntut untuk menjaga nama baik kampus agar apa yang terjadi di kampus tidak menyebar keluar. Waktu itu kita sempat mengadakan pertemuan dengan keluarga penyintas ‘65. Setelah melihat poster kami, pihak kampus meminta untuk membatalkan acara tersebut. Kami mengganti tempat diskusi kampus dan menyebarkan informasi diskusi tersebut untuk kalangan internal saja. Akhirnya tetap terlaksana. Tekanan kami menjaga nama baik kampus, karena kampus terafiliasi dengan salah satu ormas Islam” H (L, 22, UMY)*

Selain melalui aturan yang membatasi gerak mahasiswa, pembatasan melalui bangunan juga dialami oleh mahasiswa dengan

pemberlakuan penutupan portal kampus sehingga mobilitas mahasiswa ketika aksi menjadi tidak bebas. Bahkan, di Yogyakarta, terdapat kampus yang membekukan BEM dan menurunkan jabatan ketua BEM-nya.

## 2) MBKM, MAGANG, DAN KEGIATAN LAINNYA

Kebijakan MBKM membawa dampak yang cukup signifikan bagi gerakan mahasiswa. Mahasiswa mengikuti MBKM karena gerakan mahasiswa tidak dapat menyediakan apa yang MBKM sediakan. Dukungan finansial, pengalaman dan pengetahuan baru yang dianggap lebih berguna di dunia kerja, perluasan relasi dan jaringan, menjadi poin tambahan MBKM. Program tersebut menyita perhatian mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Bagi mahasiswa baru, ia menjadi pilihan untuk mencari “ilmu yang aplikatif”. Sementara, bagi mahasiswa lama, MBKM memberikan tambahan penghidupan dan persiapan masuk pasar tenaga kerja.

*“Nah, 2021 banyak teman-teman yang aktif di gerakan sosial, kemudian harus ikut program MBKM, misalnya kampus mengajar, program magang, dan sebagainya karena beberapa kebutuhan, salah satunya akademik. Kedua, ekonomi juga, dan yang ketiga kebutuhan pengalaman dan jaringan yang mungkin beberapa hal tersebut itu tidak disediakan oleh ruang organisasi dalam gerakan mahasiswa. Jadi, aku pikir itu sih beberapa faktornya karena memang tawaran dari MBKM berukuran jaringan, faktor ekonomi, juga faktor akademik yang itu bertabrakan dengan idealisme mahasiswa.” M (L, 22, UNY)*

Oleh karenanya, MBKM lebih dilirik oleh mahasiswa dibandingkan gerakan mahasiswa itu sendiri. Gerakan mahasiswa dianggap tidak “menghasilkan” sesuatu yang signifikan bagi mahasiswa. MBKM menjadi pilihan untuk menyambung hidup ke depannya oleh beberapa mahasiswa dengan berbagai programnya. Meski beberapa aktivis mengatakan bahwa MBKM menjadi salah satu faktor untuk memperlambat proses kaderisasi.



Kegiatan lain yang mempengaruhi atensi mahasiswa untuk bergabung dalam gerakan mahasiswa adalah tawaran untuk mengikuti acara yang lebih “menghasilkan”. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (PMW) dianggap lebih bisa mengisi CV untuk kegiatan kedepannya. Bahkan, beberapa kampus menyiapkan program inkubasi -pembinaan dan karantina- untuk mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti kompetisi tersebut.

*“Jangan ya, jangan kayak gitu (ikut aksi). Enak-enak kamu ikut penelitian aja deh. Kita kasih buku, ruang ini. Penelitian ini, ikutin aja . Dulu aku pernah dengar dari temanku, dia disuruh jualan. Dibiayain dari kampus, disuruh jualan.” S (P, 23, UNY)*

### 3) INTIMIDASI

Beberapa narasumber menuturkan bahwa ia mendapatkan teror dari intel melalui pesan WhatsApp hingga SMS dari nomor tidak dikenal. Ia juga mendapatkan kiriman “hadiah” yang dikirimkan ke nomornya. Sementara, beberapa narasumber lain dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan menyamar sebagai temannya. Ia menuturkan, tidak hanya di dunia maya, salah satu narasumber mengatakan kos yang ia tinggali diacak-acak oleh orang tidak dikenal. D (P, 22, UII)

“Aku udah takut, apalagi aku pegang jaringan nasional pakai nama, pakai nomorku pribadi lagi waktu itu. Terus habis itu takut banget, kan. Udah waktu itu hujan ya, terus aku chat temanku, aku ini-ini, tolong jemput aku dong, gitu. Sebelum temanku sampai di kos, aku tuh di-chat sama salah seorang, nggak tahu juga ini siapa, katanya dia itu mau ngirim jilbab buat aku, makanya dia minta share lokasi aku, kan. Aku mau ngirim jilbab nih buat kamu, share doang lokasi kamu, gitu-gitu. Aku gak share kan, lama, beberapa menit. Terus habis itu, dia kirim gambar, kamu di sini kan. Jadi dia tuh ngirimin lokasi aku, kamu di sini kan, terus aku tuh udah deg-degan.” D (P, 22, UII).

Sementara, seorang narasumber lain, inisial G (P, 25, UGM), dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan menyamar sebagai temannya yang ingin meminjam laptopnya.

“Ya aku takut banget ngomongnya, ditungguin sama ya, kayak, om-om gitu, intel gitu, pakai. Aku inget banget, waktu itu pakai mobil merah, kalau gak salah, ya gitu deh. Pokoknya feelingku sih, itu dia ya, terus abis itu, karena dugaanku, meski aku gak paham ya, teknologi yang seperti apa, tracker-tracker gitu, seperti apa. Cuma dugaanku, hpku sudah kesadap, makanya kenapa pesen-pesan aku tuh nggak bisa dibaca gitu loh, kok bisa aku mau ke sini, mau ke sini, dia tau, gitu loh.” D (P, 22, UII)

Selain itu, mahasiswa yang terlibat dalam aksi juga kerap mendapatkan pemanggilan oleh pihak kampus untuk menemui prodi dan pejabat kampus lainnya. Ia dipanggil dan diancaman *drop-out* serta intimidasi bagi mahasiswa yang mengikuti aksi. Selain kampus, laku pemerintah daerah dan aparat turut menjadi salah satu aktor yang merepresi kegiatan aktivisme mahasiswa. Represi tersebut berupa pemukulan, penahanan tidak boleh memasuki area tertentu, dan pelemparan gas air mata sering menjadi ancaman nyata bagi aksi-aksi gerakan mahasiswa. Salah satu aktivis mahasiswa bersaksi bahwa ia terkena gas air mata dan pingsan di Jalan Malioboro. Selepasnya, ia masuk rumah sakit.

*“Aku kena gas air mata, aku pingsan di jalan, di malioboro. Sehari kemudian aku masuk rumah sakit.” D (P, 22, UII)*

## ***B. Tantangan Internal Gerakan Mahasiswa***

Riset ini menemukan bahwa gerakan mahasiswa mendapati banyak tantangan yang hadir dari dalam gerakan itu sendiri. Berikut di antaranya:

### **1) FRAGMENTASI ISU**

Permasalahan di Indonesia yang cukup banyak membuat gerakan memiliki beragam fragmentasi berdasarkan isu atau perspektif. Adapun fragmentasi isu yang kerap ditemukan yakni isu HAM, buruh, perempuan atau gender, lingkungan, agraria, politik-hukum, korupsi, sampai isu Papua. Lebih lanjut, di dalam isu-isu tersebut, masih ditemukan cabang-cabang fragmentasi yang lain.

Sebagian besar aktivis yang diwawancarai, mengaku bahwa penentuan isu gerakan cenderung demokratis sebab semua diberi ruang yang sama untuk mengemukakan pendapat. Namun, penentuan ini memakan waktu dan proses cukup lama sebab banyaknya kepentingan yang dibawa tiap-tiap individu atau kelompok. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat seringkali pada saat aksi menjadi tidak bisa terfokus hanya satu isu. Oleh karenanya, dalam satu aksi, terkadang isu yang dibawa sangat beragam. Tidak semua mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut memahami maksud tuntutan yang dibawakan. Hal ini berimbas kepada multi-tafsir tuntutan yang ada di dalam aksi. Tidak jarang pula terdapat pemberitaan tentang massa aksi yang tidak mengetahui substansi tuntutan.

Selain itu, keberlanjutan isu juga menjadi pekerjaan rumah bagi gerakan mahasiswa. Selepas aksi seremonial jalanan, gerakan mahasiswa bubar begitu saja. Tidak jarang isu yang dibawa pasca aksi seremonial jalanan tidak dibawa ketika aksi setelahnya. Dan atau, setelah tercerai berai, gerakan mahasiswa bingung setelah aksi akan ada kegiatan apa. Aksi seremonial jalanan menjadi gaya hidup yang terkadang isu sebelumnya yang belum tuntas terputus. Meski memang pasca aksi Gejayan Memanggil, terdapat forum bersama-sama untuk membentuk “parlemen tandingan”.

Oleh karenanya, pola gerakan mahasiswa cenderung tercerai-berai. Pada satu momen, berbagai partikularitas mahasiswa mengangkat isu dan menyatukan berbagai perbedaan yang ada di dalam diri mereka. Namun, pasca aksi, tidak ada ekuivalensi yang mengikat antar partikularitas tersebut. Pada akhirnya, mereka tercerai berai lagi dan menunggu momen untuk membangun ekuivalensi lagi. Dan proses tersebut terus menerus terulang.

## 2) EGO SEKTORAL DAN PECAH KONGSI

Fragmentasi menjadi sesuatu yang niscaya dalam gerakan. Tidak jarang terdapat individu atau kelompok yang bersikeras mempertahankan dan memaksakan kepentingan yang dibawanya. Meski beberapa aktivis mengatakan proses penentuan isu cenderung demokratis, namun karena ego masing-masing kelompok tidak jarang membawa pecah kongsi. Salah satu narasumber mengatakan bahwa beberapa pihak yang merasa suaranya tidak didengar dan kurang puas dengan hasil-hasil konsolidasi kemudian turut membentuk kelompok dan ruang gerak yang baru.

Beberapa aktivis menyatakan bahwa tingginya tingkat ego sektoral di antara organisasi mahasiswa telah menyebabkan konflik internal maupun antar organisasi mahasiswa, hingga menyebabkan tidak terfokusnya gerakan pada suatu isu yang diangkat dan mengarah pada pecah kongsi.

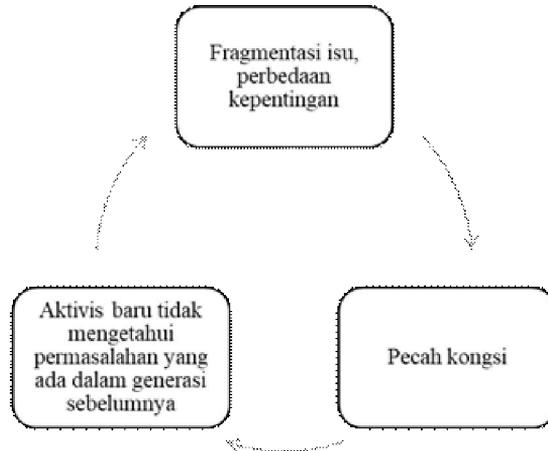
*“Sering banget ada perpecahan. Dasarnya macam-macam dan kadang saya sendiri agak bingung, kok bisa sih kayak gitu aja bisa pecah.”* A (L, 25, UII)

Namun ada aktivis mahasiswa yang berdalih bahwa pecah kongsi tidak benar-benar terjadi. Ia menormalisasi ketika terdapat dua kubu yang berbeda dalam suatu isu. Meski memang ketika kelompok kontra merasa tidak diwadahi dan atau sejalan dengan isu yang diangkat, mereka sepakat untuk menarik diri dari aksi.

## 3) REGENERASI

Terdapat efek domino dari tantangan internal dalam gerakan. Fragmentasi yang keras akan membawa perpecahan dalam gerakan hingga akhirnya gerakan sulit beregenerasi. Perpecahan tersebut menimbulkan keterputusan

pengetahuan. Pola yang terbentuk digambarkan dalam diagram di bawah ini:



Repetisi dari pola di atas membuat minat dari mahasiswa baru untuk turut terjun dalam dunia aktivis menjadi semakin berkurang minatnya.

*“Tahun 2021 benar-benar terasa banget sebenarnya penurunan dalam internsitas kegiatan gerakan, teman-teman yang awalnya mengisiasi gerakan di tahun 2019 akhirnya memiliki prioritas yang berbeda-beda. Akhirnya regenerasi itu sulit berjalan, entah karena kekurangan mahasiswa yang berminat atau memang stuktur dari mengkaderisasi dalam gerakan atau berbagai faktor lain, itu juga masih banyaj yang belum kita analisis. Cuman akhirnya itu (minat mahasiswa dalam gerakan) mengalami penurunan drastis dari 2021, 2022, dan sekarang 2023, meskipun sudah selesai pandemi.” M (L, 22, UNY)*

Masalah regenerasi juga berkaitan dengan program yang akan dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Salah satu narasumber yang tak ingin diungkap identitasnya, menuturkan bahwa terkadang satu orang terlalu banyak mengkoordinir kegiatan dari gerakan. Akhirnya, ia tumbang. Selain kelelahan fisik, gerakan mahasiswa juga berhadapan dengan kesehatan mental para anggotanya. Oleh karenanya, menjadikan gerakan mahasiswa yang ramah terhadap kesehatan fisik dan

kesehatan mental. Beberapa aktivis yang kelelahan secara fisik pernah memeriksakan dirinya ke rumah sakit dengan tekanan darah mencapai 140-an.

Sementara, terdapat pula kasus aktivis mahasiswa yang mundur dari gerakan karena trauma atas *doxing* yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa lainnya. Ia bahkan selama beberapa tahun menutup diri dari pembicaraan mengenai gerakan mahasiswa.

#### 4) MINIMNYA PARTISIPASI PEREMPUAN

Gerakan mahasiswa saat ini sudah lebih membuka ruang bagi pelibatan perempuan, ada beberapa posisi strategis dalam pergerakan yang dipegang oleh perempuan. Akan tetapi, masih saja terdapat beberapa hal dalam gerakan mahasiswa yang tidak ramah bagi perempuan. Hal ini turut diungkapkan oleh salah satu aktivis perempuan yang terlibat aktif dalam GM.

*“Gerakan yang kita bayangkan yaitu konsolidasi, aksi, itu sebenarnya cukup maskulin, entah dari pola komunikasi dan pola jejaringnya. Misalkan saja di Jogja banyak korban perempuan yang tidak bisa pulang malam, tapi konsolidasi selalu malam. Terus banyak perempuan yang tidak merokok tapi semua orang (digerakan) merokok.” H (L, 23, UGM)*

Perempuan di pergerakan masih rentan mengalami kekerasan seksual. Menilik data dari Komnas Perempuan dan Anak sampai dengan 2023 tercatat korban laki-laki dengan perempuan memiliki ketimpangan yang sangat ekstrem, di mana korban laki-laki sebanyak 2.884 dibandingkan dengan korban perempuan sebanyak 13.139 dan 9,1% dari korban perempuan tersebut mengenyam pendidikan tinggi (SIMFONI-PPA, 2023).

*“Perempuan di gerakan rentan dilecehkan, ya entah dilecehkan secara verbal ataupun fisik, atau bahkan dilecehkan secara, apa sih, KBGO gitu loh, jadi aku beberapa kali dapat perlakuan itu di GM ya khususnya. Kalau di Uber belum pernah.” D (P, 22, UII)*

### ***C. Posisi Terhadap Moralitas***

Dalam riset ini, kami menemukan tiga pola terhadap moralitas gerakan mahasiswa; (1) menerima, (2) menolak, tetapi secara esensial menerima, (3) Menolak.

#### **1) MENERIMA**

Pengaminan moralitas berimbas kepada terpisahnya posisi mahasiswa sebagai satu kesatuan dari rakyat. Mengamini Sastra-midjaja (2019) bahwa warisan Angkatan '66 menjadikan mahasiswa sebagai kelas politik penting untuk menjaga "kewarasan" negara. Hal tersebut menyebabkan "mahasiswa" menjadi kelas elit yang paling tahu permasalahan dan paling *afdhol* menyuarakan suara rakyat. Pada akhirnya, mahasiswa menjadi terpisah dengan rakyat. Pemisahan ini juga berdampak pada terjebaknya mahasiswa sebagai *messiah* atau "juru selamat". Pada titik paling ekstrem, bahwa karena ia terdidik dan paling tahu isu, akhirnya menganggap rakyat tidak tahu apa-apa dan harus "disadarkan".

Meskipun tidak sampai pada titik ekstrem, pengaminan mahasiswa sebagai orang yang memiliki *privilege* (hak istimewa) menjadi argumen utama mengapa mahasiswa harus bergerak. Dalam wawancara dengan N, UMY menyebut "mahasiswa memiliki hak istimewa memperoleh keilmuan dibandingkan masyarakat luas. Oleh karenanya, ia harus menggunakan keistimewaan keilmuan itu untuk masyarakat luas".

Selain keistimewaan keilmuan, istilah lain yang digunakan untuk mengamini dimensi moralitas ini adalah "kompas moral" seperti riset Aspinall (2012).

*"Kalau untuk sekarang ya sepakat (kompas moral) untuk menjaga jalan negara. Isu-isu yang bisa membuat negara ini terpecah mungkin bisa diselesaikan oleh gerakan mahasiswa. Sebenarnya fungsi mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat ke negara. Kita sekarang mengalami kesulitan karena bingung masyarakat yang mana yang mau kita sambungkan kepada negara. Ada juga beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan adanya gerakan-gerakan mahasiswa." H (L, 22, UMY)*

Dengan posisi yang hampir sama, salah satu aktivis dari UIN, J mengamini istilah *agent of change*. Baginya, mahasiswa adalah agen, sementara perubahan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ia menggunakan istilah “agen yang mengantarkan” dengan penggambaran kasus di Wadas. “Agen yang mengantarkan” tersebut melihat antusiasme dari Gempa Dewa dan ibu-ibu di Wadas. Gerakan di Wadas kemudian yang melakukan perubahan. Posisi mahasiswa lagi-lagi ia tekankan sebagai “agen yang mengantarkan”. Penggambaran yang sama dilakukan oleh salah seorang aktivis dari UII, A dengan mengutip “Sang Pemula” karya Pramoedya Ananta Toer. Baginya, mahasiswa adalah pemantik.

Hal yang luput dari imajinasi tersebut adalah posisi rentan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa dihadapkan pada kondisi pasar tenaga kerja yang saling sikut untuk mendapat penghidupan. Namun, imajinasi “juru selamat” malah menempatkan posisi mahasiswa sebagai kelas yang harus menyelesaikan masalah dan menjadi mitra kritis pemerintah. Meski pun memang “penyelesaian lebih lanjut” diselesaikan oleh pemerintah. Mahasiswa pada dasarnya adalah partikularitas di dalam rakyat itu sendiri. Membangun ekuivalensi antar gerakan rakyat adalah pekerjaan bagi semua partikularitas gerakan rakyat. Agar tuntutan dapat tercapai, mendobrak imajinasi “moralitas” diperlukan untuk menundukkan posisi mahasiswa sebagai rakyat.

Meskipun, salah satu aktivis mahasiswa dari UGM, G mengatakan tidak ada senjata lain selain heroisme dari gerakan mahasiswa. Utamanya ruang komunikasi pasca Covid yang makin mengecil.

*“Ketika saya mau lulus saya pikir, itu too much digaungkan. Kita nggak perlu gitu. Biarkan orang belajar empati senatural mungkin. Tapi setelah saya lulus, pandemi terjadi, kanal-kanal komunikasi antar-generasi mulai terbatas, termasuk komunikasi terkait dengan organisasi politik, organisasi kampus. Dan akhirnya kita melihat bagaimana narasi pergerakan di kampus sudah mulai meredup. Dan mungkin hero-hero kompleks itu perlu ada untuk dia kemudian kita sebagai pelajar yang mengeksplorasi hal-hal. Dan saya percaya bahwa empati itu sesuatu yang dipraktikan. Saya pribadi merasa, bukan nggak setuju sih, tapi*

memang itu cukup naif dalam artian karena kuasa politik itu terlalu besar dibandingkan hanya dengan mahasiswa. Di satu sisi, mungkin heroisme dibutuhkan untuk orang berani setidaknya pasang badan. Karena mahasiswa nggak punya apa-apa lagi, dia tidak punya organisasi politik formal, dia tidak punya sumber daya finansial yang mapan.” G (P, 25, UGM)

Baginya, meng-ada gerakan mahasiswa dibentuk oleh ekspresi “keberanian” untuk pasang badan. “*Heroism complex*” ada pada tataran awal, tetapi seiring berjalannya waktu dengan pengalaman empati dan berjumpa dengan gerakan yang lebih luas, ia akan menghilang dengan sendirinya. Meskipun ia sadar bahwa ada salah kaprah terkait posisi gerakan mahasiswa.

“Karena memang ketika orang bicara gerakan sipil, ada kecenderungan untuk memisahkan gerakan mahasiswa itu sebagai entitas yang berbeda dari masyarakat. Karena mungkin di banyak pandangan, mahasiswa dianggap sebagai penyambung lidah. Ketika penyambung lidah, ada indikasi bahwa mahasiswa merepresentasikan masyarakat. Dengan logika yang seperti representasi, berarti dia posisinya kalau bukan di atas setidaknya berbeda dengan masyarakat. Itu kan konsekuensinya. Ketika kita bicara mahasiswa itu sebagai representasi masyarakat. Istilah penyambung lidah menurut saya itu kurang produktif.” G (P, 25, UGM)

Berkenaan dengan penerimaan dimensi moral, ia tidak hanya berhubungan dengan posisi *agent of change*, tetapi juga berkenaan dengan “jalan lurus” dan “mitra kritis” pemerintah. Salah satu aktivis mengatakan bahwa “yang perlu kita lawan adalah pembohong”. Dalam konteks yang lebih luas, apa yang ia maksud sebagai “pembohong” adalah perbedaan antara ucapan dan perbuatan.

## **2) MENOLAK, TETAPI SECARA ESENSIAL MENERIMA**

Beberapa aktivis mahasiswa mengatakan tidak sepakat dengan istilah *agent of change* yang disematkan kepada gerakan mahasiswa. Tetapi, ia secara tidak langsung mengamini posisi mahasiswa sebagai

*agent of change*. Posisi mahasiswa direpresentasikan sebagai aktor ditengah-tengah masyarakat dan negara. Oleh karenanya, meskipun mereka menolak istilah *agent of change*, namun secara esensial, mereka masih mengamini istilah tersebut. Salah satu aktivis mengatakan, “Tidak begitu setuju dengan istilah *agent of change*, tetapi lebih menilai bahwa mahasiswa itu adalah yang memantik perubahan. Jadi justru bukan penyambung lidah rakyat yang seolah-olah rakyat tidak bisa menyuarakan. Tetapi, mereka justru harusnya turun bersama-sama. Dalam bahasa gerakan, mengorganisir ke akar rumput. Ya posisinya sekarang masih aktor intermediari, pen jembatan. Jadi aku pikir masih 11-12 dengan gerakan-gerakan moral yang muncul di tahun 74 atau 78. Jadi ketika ada isu yang menindas, mereka muncul ke permukaan untuk melakukan aksi, tapi entah bagaimana, mau gagal atau berhasil.” A (L, 25, UII)

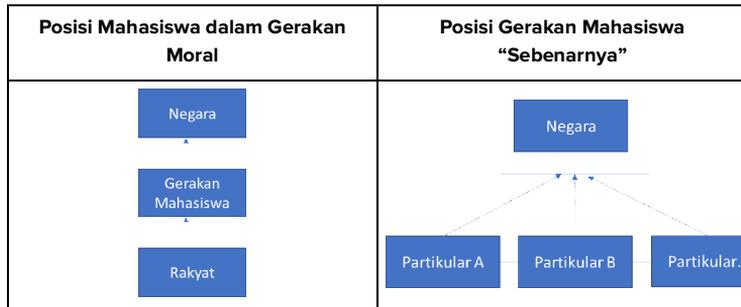
Hal tersebut juga diamini oleh salah seorang aktivis lainnya. Ia menolak istilah *agent of change*, tetapi posisi mahasiswa sebagai penyambung lidah.

“Untuk beberapa kondisi, iya (sebagai penyambung lidah). Mereka memang benar-benar ada di ruang yang sangat aman untuk berbicara isu apapun. Mereka tidak seperti pekerja yang harus pagi-sore bekerja. Mereka bisa menyuarakan isu dan mereka dilindungi di ruang-ruang institusi yang itu menjamin kebebasan akademik. Meski, kalau misalnya ngomongin yang lebih besar lagi, ya terkadang itu juga mereduksi ataupun jadi glorifikasi, narasi-narasi itu diromantisir, sering kali malah keliru. Mahasiswa sendiri juga akhirnya tidak mau belajar untuk semakin merumuskan posisi mereka, agar tetap relevan di kondisi sekarang.” H (L, 23, UGM)

Pada posisi ini, gerakan mahasiswa memang menolak secara harfiah penekanan gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan. Tetapi, posisi tersebut bertolak belakang dengan pemosisian gerakan mahasiswa. Maka posisi gerakan mahasiswa masih diandaikan dalam

posisi yang berada di tengah-tengah sebagai penghubung dari rakyat ke negara.

Apabila digambarkan, maka:



Pada posisi gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral, ia terpisah dari rakyat yang seakan-akan menjadi aktor yang berbeda. Penggunaan bahasa seperti "ia memiliki privilege keilmuan yang bisa membaca persoalan dan disampaikan ke rakyat" dan atau "aktor intermediari" menjadi petanda gerakan moral itu sendiri. Sementara, pada posisi gerakan mahasiswa "sebenarnya", gerakan mahasiswa masuk dalam partikularitas gerakan rakyat itu sendiri. Ia memiliki ekuivalensi dengan gerakan rakyat lainnya. Sementara itu, posisi dengan aktor yang dianggap "musuh bersama", ditandai dengan "batas politik". Ia merupakan batas yang membatasi subjek untuk beraliansi dan atau tidak beraliansi. Hal tersebut yang tidak disadari oleh aktivis mahasiswa yang mengamini posisi "menolak, tetapi secara esensial menerima".

### 3) MENOLAK

Posisi penolakan istilah "*agent of change*" dan "penyambung lidah" diamini oleh salah seorang aktivis mahasiswa dari UNY, M. Baginya posisi tersebut menjebak mahasiswa dalam imajinasi juru selamat. Ia mengatakan,

*"Aku tidak sepakat dengan istilah tersebut. Mahasiswa bukan agen-agen apa-apa. Mereka punya waktu, semangat, dan determinasi untuk melakukan perubahan. Namun pada akhirnya perubahan tidak bisa*

*dalam jangka tempo mahasiswa saja. Dan mahasiswa sendiri sebagai satu kelompok yang jumlahnya juga tidak banyak, jadi tidak bisa menjadi agent of change. Dan seakan memposisikan mahasiswa di atas yang lain, atau sebagai juru selamat di antara kelompok yang lain. Sebenarnya pada umumnya aku tidak terlalu suka istilah yang heroik-heroik, yang suka disematkan kepada mahasiswa. Mungkin jadi cukup menarik bagi mahasiswa baru mendengarkan istilah heroik. Hanya saja, kalau kita membicarakan istilah penyambung lidah, semuanya harus menjadi lidahnya masing-masing...jangan sampai kita jatuh menjadi star syndrome atau messiah complex dalam gerakan sosial kita sendiri.” M (L, 22, UNY)*

Baginya, gerakan mahasiswa pada posisi gerakan rakyat lain bertugas bersolidaritas dan menguatkan. Artinya, membangun ekivalensi dengan gerakan rakyat lain. Penyuaan isu pada batas-batas tertentu dan tidak menjadi juru selamat. Novianto (2016) menekankan bahwa gerakan moral mengkonstruksi diri mereka sebagai resi, *agent of change*, tulang punggung negara, intelektual pembaharu, roda perubahan dan juga konstruksi heroisme yang lainnya. Konstruksi superioritas mahasiswa tersebut dilakukan oleh rezim Orba dengan melakukan depolitisasi identitas dan untuk membedakannya dengan Pemuda yang konstruksi pemaknaannya merupakan para nasionalis pejuang kemerdekaan, penentang penjajahan, memiliki keberanian yang kuat dan lebih dekat dengan komunisme atau akar gerakan kiri di Indonesia (Novianto, 2016).

*“Pengetahuan dan intelektualisme mereka merupakan produk dari relasi produksi kapitalisme yang bertransformasi mendukung hirarki pengetahuan diantara masyarakat. Para mahasiswa ini sebagian besar adalah kelas menengah baru yang dihasilkan dari perkembangan kapitalisme di Indonesia. Hal tersebut memang secara spontan membawa watak mahasiswa menjadi watak moralis, karena itu selaras dengan ideologi kelas menengah. Disenyapkannya tradisi intelektual organik yang membawa perjuangan emansipasif membuat imajinasi perlawanan mereka bersifat reformis dengan metode kekuatan moral. Alih-alih*

---

*membawa perubahan transformatif, gerakan moral yang mereka perjuangkan cenderung mengalami keterputusan antara wacana dan orientasi perjuangan praksis.” (Novianto, 2016)*

Oleh karenanya, seperti yang telah dijelaskan, maka membangun ekuivalensi dengan gerakan rakyat lainnya menjadi pekerjaan bagi semua gerakan. Alih-alih menjadi bagian dari gerakan rakyat, gerakan mahasiswa menjadi “juru selamat” dan “gerakan moral” yang posisinya lebih superior dari rakyat pada umumnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Novianto (2016), gerakan moral merupakan paham pemecah belah gerakan yang pondasinya mulai dibangun atas dasar kepentingan politik penguasa militer pro-Soeharto untuk menciptakan konsesus-konsesus yang mendukung penghancuran basis kelas tertindas. \*\*

**Alangkah menyedihkan  
suatu bangsa yang  
pikiran sebagian besar  
warganya tak pernah  
lebih luas dari lingkaran  
piring nasi.**

***—Mahasiswa Indonesia: Amarah Suci***

---



# Penutup

**R**iset ini menemukan bahwa gerakan mahasiswa pasca Orde Baru mengalami berbagai tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal mulai dari kebijakan kampus yang membatasi gerakan mahasiswa hingga kebijakan nasional MBKM. Tidak jarang juga gerakan mahasiswa mengalami intimidasi hingga berujung pada kekerasan. Bahkan, dalam beberapa kasus, aktivis mahasiswa diintai oleh aparat keamanan sampai kos yang ia tempati diacak-acak. Intimidasi yang dialami juga dalam bentuk maya, yaitu teror lewat perpesan digital.

Sementara, terdapat empat problem internal yang menyerauk di dalam tubuh gerakan mahasiswa, yaitu; fragmentasi dan keberlanjutan isu, ego sektoral, regenerasi, dan minimnya partisipasi perempuan. Fragmentasi dan keberlanjutan isu berkenaan dengan majemuknya isu yang ada di dalam tiap-tiap aksi. Namun, pasca-aksi, isu yang dilontarkan terkadang dilupakan dan atau jalan di tempat. Sementara, ego sektoral merupakan dampak dari fragmentasi isu dan terkadang menyebabkan pecah kongsi dalam aliansi gerakan mahasiswa. Regenerasi merupakan imbas dari MBKM yang menggeser perhatian mahasiswa. Alih-alih mengikuti gerakan mahasiswa, mahasiswa dialihkan perhatiannya ke hal yang dikonstruksikan lebih bernilai daripada menghidupi gerakan mahasiswa. Minimnya partisipasi perempuan karena ada anggapan bahwa gerakan mahasiswa adalah ranah "maskulinitas". Hal ini juga

digambarkan lewat kondisi rapat yang ada di dalam gerakan mahasiswa.

Lebih lanjut, riset ini menemukan bahwa gerakan mahasiswa masih mengamini moralitas angkatan '66 seperti yang telah dituliskan oleh Aspinall (2012), Sastramidjaja (2019), dan Novianto (2016). Efek imajinasi tersebut menjadikan gerakan mahasiswa menjadi gerakan yang elitis dan terpisah dengan rakyat. Meskipun memang sudah ada kesadaran dari aktivis mahasiswa untuk menghilangkan imajinasi tersebut.\*\*

# Daftar Pustaka:

- Amin, M., & Ritonga, A. D. (2023). Populist student organizations in Indonesia: an analysis of anti-establishment ideas. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 229. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01697-9>
- Marsh, D., & Stoker, G. (2010). *Theory and Methods in Political Science: Third Edition*.
- Novianto, Arif. (2016). Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik Terhadap Gerakan Moral. Dalam *Indonesia Bergerak II: Mozaik Kebijakan Publik 2016*. Pustaka Pelajar & MAP UGM
- Husin, L. H. (2014). *Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan: Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM dari Masa Orde Lama hingga Pasca-Reformasi* (D. K. Michellia, Ed.). PolGov. <http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>
- Robinson, Oliver C. (2013). Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide. *Qualitative Research in Psychology*, 11(1), 25-41, DOI: 10.1080/14780887.2013.801543
- Sastramidjaja, Y. (2019). Student Movements and Indonesia's Democratic Transition. Dalam *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*. Cornell University.
- SIMFONI-PPA. (2023). *SIMFONI-PPA*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Weiss, M. L., & Aspinall, E. (Eds.). (2012). Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism. Dalam *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness*. University of Minnesota Press.





**AKADEMI  
AMARTYA**

